

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

Tujuan pendidikan yang kita harapkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan". Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi, demokratis, dan toleran dengan mengutamakan persatuan bangsa dan bukannya perpecahan.

Pendidikan di Indonesia apakah dapat dikatakan menunjang untuk pendidikan yang baik? Itulah pertanyaan yang sering timbul dalam dunia

pendidikan kita untuk melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang seperti sekarang ini. Di berbagai daerah misalnya, tidak sedikit bangunan sekolah yang berdiri kokoh dengan fasilitas yang memadai, yang selalu ada saja kekurangan dalam pendirian bangunan atau pengadaan fasilitas yang menunjang dalam pendidikan. Sekolah sebagai sarana dan sebagai tempat untuk pelaksanaan pendidikan seharusnya berusaha melengkapi segala macam kekurangan yang ada dalam sekolah tersebut.

Sekolah sebagai tempat pemberian ilmu dari guru kepada peserta didik sebaiknya menunjang pemberian ilmu secara lengkap dan menyeluruh sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku. sekolah sebagai tempat para siswa melakukan praktek atau melakukan daya kreasi atau daya imajinasi yang sesuai dengan yang diajarkan guru, sebaiknya memberikan sarana yang menunjang dalam mewujudkan daya imajinasi dan kreativitas peserta didik.

Sekolah sebagai tempat bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya atau dengan guru atau dengan karyawan yang ada dalam sekolah tersebut berusaha memberikan layanan terbaiknya agar anak dapat berinteraksi dengan baik dan dia (anak) tidak merasa tertekan atau tidak senang dengan berada dalam sekolah.

Namun pada kenyataannya sekarang sarana pendidikan atau sekolah khususnya belum menampakkan fungsinya yang baik. Masih banyak kekurangan yang ada pada sekolah-sekolah di Indonesia umumnya dan pada daerah-daerah pelosok khususnya. Alasan yang pokok adalah kurang terjangkaunya daerah tersebut oleh peralatan-peralatan yang modern.

Selain itu fasilitas yang ada pada sekolah-sekolah boleh dikatakan sangat kurang dan jauh dari cukup. Terlebih pada daerah pinggiran kota yang kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Masih terdapatnya kekurangan seperti, genting, sekolah yang akan runtuh, tembok sekolah yang mulai doyong sampai ada salah satu kelas yang sudah rata dengan tanah.

Walaupun dengan kondisi yang memprihatinkan, kita sepatutnya bangga dengan hasil yang dapat dicapai putra-putri bangsa, yaitu yang berhasil menyumbangkan ilmunya demi kemajuan bangsa.

Pada era globalisasi, kemajuan sekolah merupakan esensi dari pengelolaan sekolah melalui pemeliharaan mutu, responsif terhadap tantangan dan antisipatif terhadap perubahan-perubahan yang serba cepat dan menjadikan gejolak dalam kehidupan. Hal ini memacu dan mendorong para praktisi, birokrat, dan akademisi pendidikan untuk berpacu mengembangkan strategi perubahan dan kebijakan antisipatif sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan baru dengan tetap memegang teguh nilai-nilai jati diri bangsa yang terpelihara. Globalisasi memberikan warna tersendiri bagi arah pencapaian tujuan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus dilakukan, diantaranya dengan kebijakan otonomi daerah yang telah digulirkan semenjak ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2000 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah. Dilaksanakannya otonomi daerah ternyata membawa dampak pada pengelolaan bidang pendidikan yang selama ini sentralistik menuju pada desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan pendidikan mengandung arti

adanya pelimpahan wewenang berkaitan dengan konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan diberikan pada tingkat yang lebih bawah. Dalam struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara desentralisasi, kepala sekolah tidak semata-mata merupakan seorang guru kepala, tetapi seorang pemimpin profesional dengan tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh sekolahnya (Purwanto, 2008: 130).

Pada sekolah yang menerapkan MBS, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyetarakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap (Anonim, 2007 : 17-18 ).

Salah satu faktor penting yang ikut menentukan tercapai-tidaknya tujuan sekolah adalah pengelolaan sekolah yang bersangkutan, berupa penerapan sejumlah prinsip dasar organisasi yang meliputi: penentuan visi, misi, dan tujuan sekolah, penentuan struktur organisasi atau pola kerjasama, pembagian kerja, koordinasi, kelancaran komunikasi, proses pengambilan keputusan, dan penjaminan kelangsungan hidup organisasi.

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan MBS, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan begitu, MBS sebagai paradigma baru

pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan (Mulyasa, 2005: 126).

Kepala sekolah adalah pelaksana suatu tugas yang sarat dengan harapan dan pembaharuan. Kemasan cita-cita mulia pendidikan kita secara tidak langsung diserahkan kepada kepala sekolah. Optimisme orang tua yang terkondisikan pada kepercayaan menyekolahkan putera-puterinya pada sekolah tertentu tidak lain berupa fenomena menggantungkan cita-citanya pada kepala sekolah. Peserta didik dapat belajar dan membelajarkan dirinya hanya karena fasilitasi kepala sekolah. Seenggok aturan dan kurikulum yang selanjutnya direalisasikan oleh para pendidik sudah pasti atas koordinasi dan otokrasi dari kepala sekolah. Singkatnya, kepala sekolah merupakan tokoh sentral pendidikan (Xaviery, 2004:2)

Penerapan MBS juga berimplikasi penataan ulang (*rearrangement*) fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab dari seluruh *stakeholders* sekolah: siswa, guru, kepala sekolah, warga sekolah lainnya, orang tua, masyarakat termasuk bisnis, dan pemerintah. Dalam kerangka akuntabilitas, sekolah harus pula tetap bergerak dalam koridor kebijakan umum pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, maka komitmen bersama, sikap kolaboratif, dan sinergi langkah dari semua lapisan birokrasi pendidikan, warga sekolah dan warga masyarakat mutlak diperlukan bagi keberhasilan MBS, dan tentu saja bagi suksesnya pendidikan nasional kita (Zamroni, 2005:2)

Menurut Wohlstetter dan Mohrman (1993) terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan yaitu *power/authority*, *knowledge*,

*information* dan *reward*. Pertama, kekuasaan/kewenangan (*power/authority*) harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah. Sedikitnya terhadap tiga bidang penting yaitu *budget, personnel* dan *curriculum*. Termasuk dalam kewenangan ini adalah menyangkut pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, guru dan staff sekolah (Nurkholis, 2007: 2)

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab XII Pasal 45 ayat (1) dinyatakan, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik

Sesuai dengan Keputusan Mendiknas Nomor 053/V/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (2003:48-49), untuk lebih terperinci tentang sarana prasarana yaitu lahan / luas tanah yang diperlukan untuk mendirikan sekolah harus memenuhi kebutuhan antara lain : Ruang Pendidikan, meliputi: a) ruang kelas / belajar, b) ruang perpustakaan, c) tempat bermain / fasilitas olah raga, d) tempat upacara. ruang administrasi / kantor meliputi : a) ruang kepala sekolah, b) ruang guru, c) ruang tata usaha. 3) ruang penunjang meliputi: a) ruang UKS, b) ruang ibadah, c) ruang koperasi sekolah/ kantin/ warung, d) kebun sekolah halaman sekolah. Kebun sekolah berada di wilayah permukiman sesuai dengan cakupan wilayah sehingga mudah dijangkau dan aman dari gangguan bencana alam maupun lingkungan yang kurang baik.

Dengan otonomi daerah, maka wewenang pusat dilimpahkan kepada daerah untuk menangani urusannya masing-masing. Di Indonesia otonomi daerah tidak dilaksanakan secara frontal untuk segala urusan, tetapi sebagian urusan daerah tidak lagi diintervensi oleh pemerintah pusat. Melihat kondisi ini, maka diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Penataan otonomi daerah yang seluas-luasnya akan mempengaruhi penataan institusi dan berdampak pada manajemen berbagai sumber daya yang ada di daerah. Apabila otonomi daerah dikonsentrasikan di wilayah kota atau kabupaten, maka propinsi tidak lagi sebagai pemerintah otonom, tetapi bersifat koordinatif. Wewenang penyelenggaraan segala urusan berada pada tingkat kota atau kabupaten. Hal ini akan membawa dampak pada penataan sistem pendidikan, termasuk organisasi penyelenggara, kurikulum, penataan SDM, pendanaan, sistem manajemen, sarana prasarana, dan pengembangan pendidikan daerah.

Pendidikan yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dari daerah tempat berlangsung pendidikan. Unsur muatan lokal yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

Dengan demikian, tuntutan pendidikan sekarang dan masa depan harus diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan intelektual, profesional dan sikap, kepribadian dan moral manusia Indonesia pada umumnya. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia ini diharapkan dapat mendudukkan diri secara bermartabat di masyarakat dunia di era globalisasi ini.

Mengenai kecenderungan merosotnya pencapaian hasil pendidikan selama ini, langkah antisipatif yang perlu ditempuh adalah mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta perbaikan manajemen di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah, khususnya di kabupaten/kota, seyogyanya dikaji lebih dulu kondisi obyektif dari unsur-unsur yang terkait pada mutu pendidikan, yaitu: (1) Bagaimana kondisi gurunya? (persebaran, kualifikasi, kompetensi penguasaan materi, kompetensi pembelajaran, kompetensi sosial-personal, tingkat kesejahteraan); (2) Bagaimana kurikulum disikapi dan diperlakukan oleh guru dan pejabat pendidikan daerah?; (3) Bagaimana bahan belajar yang dipakai oleh siswa dan guru? (proporsi buku dengan siswa, kualitas buku pelajaran); (4) Apa saja yang dirujuk sebagai sumber belajar oleh guru dan siswa?; (5) Bagaimana kondisi prasarana belajar yang ada?; (6) Adakah sarana pendukung belajar lainnya? (jaringan sekolah dan masyarakat, jaringan antarsekolah, jaringan sekolah dengan pusat-pusat informasi); (7) Bagaimana kondisi iklim belajar saat ini?.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi



dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi .

Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan hendaknya diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta tenaga guru. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sekolah sebagai unit terdepan wajib melaksanakan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya, diantaranya melalui pengelolaan sarana prasarana pendukung pendidikan. Pengelolaan sarana prasarana sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan sekolah secara keseluruhan, dituntut untuk senantiasa memberikan dukungan bagi kemudahan, kelancaran, kenyamanan guru, siswa dan komponen sekolah lainnya dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar, sehingga pada gilirannya dapat tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif.

Kondisi nyata di SMP Negeri 2 Matesih Kabupaten Karanganyar saat ini senantiasa berusaha melengkapi sarana prasarana pendukung peningkatan mutu pendidikan, meskipun kondisi nyata belum optimal, seperti gedung sekolah milik sendiri, tempat parkir memadai dengan parkir untuk guru dan siswa terpisah namun keduanya terletak di bagian dalam lingkungan sekolah sehingga lebih terjamin keamanannya, ruang kelas, Laboratorium IPA, laboratorium komputer dengan fasilitas 20 komputer, penerangan, ruang

perpustakaan, ruang BP/BK, lapangan upacara dan lapangan olahraga, meliputi lapangan bola basket, futsal, bola volley,, ruang UKS, mushola, koperasi siswa.

Perlunya diteliti sarana prasarana di SMP Negeri 2 Matesih Kabupaten Karanganyar dalam jumlah dan mutu yang terbatas, belum memadai secara optimal untuk kepentingan warga sekolah, terutama bagi siswa dan guru yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana proses belajar mengajar, sehingga pengelolaannya harus benar-benar efektif, efisien, dan kondusif, terutama pada saat pembelajaran, baik mulai dari pengadaan, perawatan, pemanfaatan maupun inventarisasi.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dirumuskan fokus yaitu ” Bagaimanakah pengelolaan sarana prasarana di SMP Negeri 2 Matesih ”. Fokus penelitian dijabarkan menjadi empat sub fokus sebagai berikut.

1. Bagaimanakah karakteristik pengadaan sarana prasarana di SMP Negeri 2 Matesih?
2. Bagaimanakah karakteristik perawatan sarana prasarana di SMP Negeri 2 Matesih?
3. Bagaimanakah karakteristik pemanfaatan sarana prasarana di SMP Negeri 2 Matesih?
4. Bagaimanakah karakteristik penginventarisan sarana prasarana di SMP Negeri 2 Matesih?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Mendeskripsikan karakteristik pengadaan sarana prasarana di SMP Negeri 2 Matesih.
2. Mendeskripsikan karakteristik perawatan sarana prasarana di SMP Negeri 2 Matesih.
3. Mendeskripsikan karakteristik pemanfaatan sarana prasarana di SMP Negeri 2 Matesih.
4. Mendeskripsikan karakteristik penginventarisan sarana prasarana di SMP Negeri 2 Matesih.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai referensi dan wawasan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan sarana prasarana.
2. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai implementasi pengelolaan yang meliputi pengadaan, perawatan, pemanfaatan, dan penginventarisan sarana prasarana.

### E. Definisi Istilah

1. **Pengelolaan** adalah rangkaian kegiatan dari berbagai komponen yang meliputi pengadaan, penginventarisasian, pemanfaatan, dan penilaian sarana prasarana yang menjadi satu kesatuan yang utuh.

2. **Sarana pendidikan** adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, serta alat-alat dan media pembelajaran (Mulyasa, 2005:49).
3. **Prasarana pendidikan** adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar (Mulyasa, 2005:49).